

EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI DESA KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR

*Effectiveness of Village Funds in Infrastructure Development in the Public
Works and Spatial Planning Subsector in Kemiri Village, Kebakkramat,
Karanganyar*

Fachrossi Pradipa Musthofa, Dr. Purbayakti Kusuma W, S.Sos, M.Si
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
fachrossi22@gmail.com

Abstrak

Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, merupakan salah satu desa yang setiap tahun menerima dana desa yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, gedung, saluran irigasi, dan taludisasi. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah, antara lain keterlambatan pelaksanaan proyek, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Permasalahan ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan purposive sampling, yang melibatkan informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kemiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait pelaksanaan pembangunan. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dana desa di Desa Kemiri dapat diukur melalui empat indikator utama yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan pelaksanaan program. Keempat indikator tersebut berjalan dengan baik, terstruktur, dan sistematis meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan, terutama terkait optimalisasi partisipasi masyarakat dan transparansi penggunaan dana. Kesimpulannya, dana desa efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Kemiri, namun perlu perencanaan yang lebih matang, peningkatan partisipasi warga melalui kerja bakti, serta transparansi melalui pelaporan berkala di papan informasi desa guna mendorong pengawasan yang lebih optimal.

Kata kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

Abstract

Kemiri Village, Kebakkramat Subdistrict, Karanganyar Regency, is one of the villages that receives village funds annually, most of which are allocated for infrastructure development such as village roads, buildings, irrigation channels, and retaining walls. However, several issues have arisen during implementation, including project delays, lack of community participation in supervision, and discrepancies between planning and execution. These problems highlight the need to evaluate the effectiveness of village fund utilization in the public works and spatial planning subsector. This study uses a qualitative method with purposive sampling involving informants such as the Village Head, Village Secretary, representatives from the Village Community Empowerment Agency (LPMD), and members of the Village Consultative Body (BPD) of Kemiri Village. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation related to development implementation. Data analysis employed the interactive analysis technique according to Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the effectiveness of village funds in Kemiri Village can be measured by four main indicators: program target accuracy, program socialization, program objectives, and program implementation monitoring. These four indicators operate well, structured, and systematically, although some shortcomings remain, especially regarding optimizing community participation and transparency in fund usage. In conclusion, village funds effectively support infrastructure development in Kemiri Village but require more careful planning, increased community participation through mutual work, and transparency through periodic reporting on village information boards to encourage better supervision.

Keywords: *Effectiveness, Village Funds, Infrastructure Development*

PENDAHULUAN

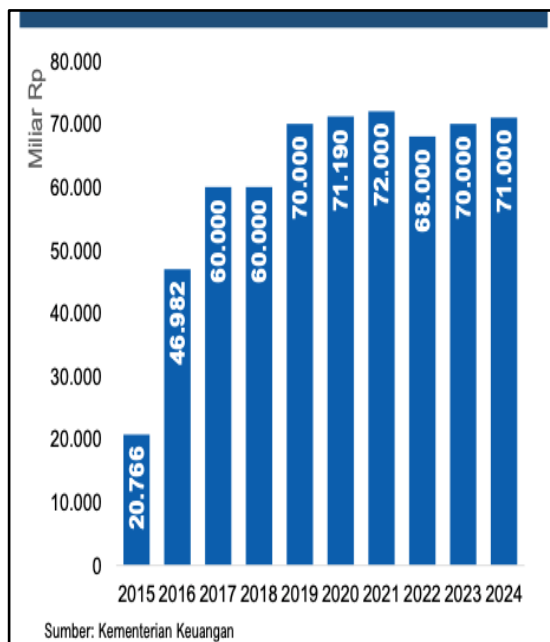
Pembangunan desa menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi desa kewenangan dan anggaran lebih besar melalui dana desa agar dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Dana desa berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan fisik desa. Program ini membiayai pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah terus meningkatkan dana desa setiap tahunnya dan menyalurkannya ke seluruh wilayah Indonesia, mengingat potensi besar desa dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional (Handayani, 2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dana desa ini disalurkan dalam beberapa tahap. Dana Desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015 oleh negara melalui pemerintah kepada 84.276 desa di seluruh Indonesia (BPS Indonesia, 2024). Sejak tahun 2015 hingga 2024, grafik alokasi dana desa

terus meningkat, yaitu: tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 sebesar Rp 47 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 60 triliun, 2019 sebesar Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71 triliun, 2021 sebesar Rp 72 triliun, 2022 sebesar Rp 68 triliun, 2023 sebesar Rp 70 triliun, dan 2024 sebesar Rp 71 triliun. Data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

Grafik 1:
Perkembangan Dana Desa dari
Tahun 2015-2024



Sumber : (<https://Updesa.Com/Besaran-Dana-Desa-2024/>) (Diakses Pada 25 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB), 2025)

Grafik 1 menunjukkan perkembangan alokasi dana desa dari tahun 2015 hingga 2024 yang mengalami peningkatan signifikan dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 71 triliun pada 2024. Meskipun terjadi fluktuasi kecil pada beberapa tahun, secara umum dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan

dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan.

Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, rutin menerima dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan saluran irigasi. Namun, observasi awal mengungkapkan sejumlah kendala, seperti keterlambatan pelaksanaan proyek, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi aspek penting agar potensi kecurangan dapat diminimalisir. Pengelolaan dana desa harus didukung sistem yang tepat agar manfaatnya optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Fenomena ini menjadi catatan penting dalam pengawasan desa terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan melalui dana pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan data internal Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2024 selama enam bulan pertama, realisasi anggaran di sub bidang tersebut baru mencapai 19,50%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek yang perlu mendapat perhatian agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal dan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.

Dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun efektivitas pengelolaannya masih menghadapi tantangan besar. Banyak desa mengalami kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, khususnya pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Akibatnya, pembangunan infrastruktur sering tidak sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak berkelanjutan. Data realisasi anggaran semester I tahun 2024 menunjukkan capaian 19,50% dari pagu, yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan proses teknis panjang seperti penyusunan desain dan dokumen pengadaan. Kondisi ini menarik untuk diteliti agar pengelolaan dana desa lebih maksimal dan bebas penyalahgunaan.

Pernyataan peneliti didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Saputra, Putri, dan Kurniawan yang menemukan adanya korupsi di tingkat desa, dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa akibat minimnya kompetensi aparat, kurangnya pengawasan pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa. Sebaliknya, Wulandari dan Yuliandari dalam penelitiannya di Desa Pucanggading menunjukkan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat aktif dalam pelaksanaan melalui swadaya dan gotong royong, serta berpartisipasi dalam musyawarah pertanggungjawaban LPJ APBDes,

menunjukkan kualitas partisipasi yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diangkat adalah sejauh mana dana desa efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan dana desa agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan dampak dana tersebut terhadap pembangunan fisik desa secara optimal dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research untuk mendalami pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur di sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan kesenjangan pembangunan antar dusun sehingga manfaat pembangunan belum merata bagi masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan LPMD, dan BPD, menggunakan panduan wawancara serta alat perekam untuk menjamin akurasi. Data sekunder

berasal dari dokumen resmi desa, arsip, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles Huberman, dan Saldana, mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi secara berulang hingga data jenuh. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan gambaran akurat mengenai efektivitas pengelolaan dana desa sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa Kemiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dana Desa berperan penting sebagai sumber pembiayaan utama dalam pembangunan desa, khususnya untuk infrastruktur dasar yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Desa Kemiri, alokasi terbesar difokuskan pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi pembangunan jalan, drainase, irigasi, gedung, gapura, dan fasilitas lain. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di bidang ini berjalan efektif, memenuhi prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan, serta terukur melalui empat indikator utama keberhasilan pembangunan.

a. Indikator Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program menunjukkan sejauh mana kegiatan menjangkau kelompok prioritas sesuai perencanaan awal. Program dinilai tepat sasaran jika manfaatnya langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan, sesuai hasil Musyawarah Desa (MusDes) dan prioritas RPJMDes. Di Desa Kemiri, contoh nyata adalah pembangunan jalan usaha tani di Dusun Beji Tengah yang mempermudah distribusi hasil panen. Penentuan sasaran sudah cukup baik melalui pemetaan kebutuhan lewat MusDes dan RKPDes, namun partisipasi warga perlu ditingkatkan agar pemerataan proyek terjadi dan tidak hanya berfokus pada dusun tertentu.

Tabel 1:

Laporan Realisasi APDES 2024 Desa Kemiri Pembangunan Jalan Tani

2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	365.871.077,00	365.864.400,00	6.677,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	365.871.077,00	365.864.400,00	6.677,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	365.871.077,00	365.864.400,00	6.677,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	74.190.000,00	74.190.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	287.084.400,00	287.084.400,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.306.677,00	1.300.000,00	6.677,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	219.346.864,00	219.273.000,00	73.864,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	219.346.864,00	219.273.000,00	73.864,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	138.346.864,00	138.295.400,00	51.464,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.780.000,00	38.780.000,00	0,00

Sumber : APDES Desa Kemiri, 2024

Realisasi pembangunan jalan usaha tani dianggarkan Rp 365.871.077,00 dan terealisasi Rp 365.864.400,00

dengan selisih hanya Rp 6.677,00 atau 0,0018%. Tingkat realisasi fisik dan keuangan hampir sempurna, menunjukkan program sesuai rencana dan lokasi prioritas. Seluruh komponen seperti upah tenaga kerja, material, dan peralatan terealisasi penuh, selisih kecil hanya pada administrasi. Efisiensi dan pengendalian anggaran tergolong sangat baik. Dengan realisasi 99,9982%, program ini sangat efektif dan tepat sasaran dalam mendukung aktivitas pertanian warga serta memperlancar distribusi hasil tani di desa.

Pada Kamis, 17 April 2025, penulis memperoleh keterangan dari Kepala Desa Kemiri, Bapak Amin Sadimin, terkait pelaksanaan dan efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, khususnya sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun anggaran 2024. Saat ditanya mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan awal, beliau memberikan penjelasan.

"Iya, kalau tidak kan tidak bisa dilaksanakan. Semua kegiatan ini sudah dirancang sejak awal melalui RPJMDes dan RKPDDes. Jadi, pelaksanaan pembangunan memang sudah sesuai dengan rencana pengelolaan dana desa dari awal."

Selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan mengenai capaian fisik pembangunan tahun 2024 sudah berapa persen, Kepala Desa menjelaskan:

"Sudah selesai, 100 persen sudah di-SPJ-

kan. Artinya semua kegiatan sudah dituntaskan secara administrasi dan fisik."

Berdasarkan dokumen realisasi anggaran yang tersedia, khusus untuk program Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani, tercatat tingkat realisasi mencapai Rp 365.864.400,00 dari total anggaran yang direncanakan awal Rp 365.871.077,00, atau sebesar 99,9982%.

Pengelolaan dana desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Desa Kemiri terbukti efektif dan tepat sasaran, dengan manfaat utama memperbaiki akses jalan tani, mendukung aktivitas pertanian, dan memperlancar distribusi hasil panen. Keberhasilan ini didukung oleh keterlibatan masyarakat, perangkat desa, serta pengawasan dari berbagai pihak di setiap tahap pembangunan.

b. Indikator Sosialisasi Program

Sosialisasi program sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 di Desa Kemiri dilakukan efektif melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, peran masyarakat, serta pemanfaatan media informasi desa seperti papan proyek, pengumuman di balai desa, dan grup WhatsApp warga. Pengelolaan dana desa berhasil mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan drainase di RT 03/RW 02 Dusun Gedangan. Program ini bertujuan mengatasi genangan air saat musim hujan yang mengganggu akses jalan dan aktivitas warga, sekaligus

meningkatkan kualitas lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit berbasis air.

Pada wawancara 17 April 2025, Sekretaris Desa Kemiri, Ibu Sri Mulyani, SE, menjelaskan capaian pembangunan tahun anggaran 2024 di sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Informasi program infrastruktur disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik konvensional seperti papan pengumuman dan pertemuan warga, maupun modern seperti grup WhatsApp, guna memastikan keterjangkauan dan pemahaman yang merata.

"Diawal tahun itu kita sudah dipenetapan APBDes untuk pembangunan selanjutnya, misal penetapan APBDes 2024 dibulan desember, diawal tahun januari sampai maret itu sudah ada festival anggaran seperti mmt yang disebar ditiap Rw, dipasang dipapan2 pengumuman yang sekiranya masyarakat sudah melihat, disitu sudah tercantum semua jenis kegiatan, baik pembangunan, baik dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang kebudayaan, pembinaan dan sebagainya disitu semua."

Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Kemiri berjalan efektif berkat sosialisasi berjenjang dari pemerintah desa ke dusun, lalu ke warga melalui pertemuan RT/RW. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, memperluas informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan, sehingga sosialisasi intensif melibatkan tokoh masyarakat seperti

RT, RW, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Mereka membantu menjelaskan rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan menyampaikan informasi kepada warga yang tidak hadir rapat, sehingga dukungan serta keterlibatan warga dalam pembangunan semakin meningkat.

c. Indikator Tercapainya Tujuan Program

Tercapainya tujuan program diukur dari terpenuhinya output, outcome, dan impact sesuai tujuan awal. Dalam pekerjaan umum dan penataan ruang, keberhasilan bukan hanya infrastruktur selesai secara teknis, tetapi juga memberi solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Indikatornya meliputi tujuan yang jelas, terukur, relevan dengan visi desa, meningkatkan akses, mengurangi genangan, dan mendukung ekonomi lokal. Contohnya pembangunan jalan lingkungan di Dukuh Dawung RT 04/RW 01 untuk mobilisasi warga. Meski umumnya berbasis kebutuhan nyata, sebagian kegiatan belum memiliki indikator output lengkap sehingga pengukuran dampaknya belum optimal.

Efektivitas kebijakan publik dinilai dari sejauh mana hasil aktual program, baik output maupun outcome, selaras dengan tujuan normatif yang telah dirumuskan sejak awal (Dunn, 2018). Dalam konteks pengelolaan dana desa, efektivitas tersebut tercermin melalui tiga aspek utama. Pertama, kegiatan yang didanai harus terlaksana secara fisik (output) sesuai rencana, baik dari segi volume, kualitas, maupun waktu.

Kedua, hasil kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat (outcome) dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Ketiga, kegiatan mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (impact) bagi desa.

Penjelasan ini sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara dengan Bapak Hari Supriyanto, SE MM selaku Perwakilan Dari LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) pada Jumat, 18 April 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diatas cukup berhasil karena segala prioritas program kerja di realisasi 2024 terlaksana dengan baik. Salah satunya yaitu dalam memastikan program pembangunan infrastruktur desa tepat tujuannya yaitu dengan memastikan tujuan program dan adanya dampak positif dari pembangunan tersebut. Dalam wawancaranya Bapak Hari Supriyanto, SE MM selaku Perwakilan Dari LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengatakan:

"Tujuan utama dari program pembangunan Infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 Ya salah satu untuk kelancaran perekonomian masyarakat, biar ngak tersendat jalane, yang kedua untuk peningkatan kegiatan masyarakat untuk kaitannya dengan fisik jalan utama maupun talud, jadi untuk perkembangan didusun."

Pengelolaan dana desa di Desa Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar terbukti efektif dalam pembangunan infrastruktur sub bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang, salah satunya melalui revitalisasi talud di jalan poros desa. Pembangunan ini berdampak signifikan bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup, memperlancar mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dampaknya terlihat pada tiga skala waktu: jangka pendek meningkatkan aksesibilitas, jangka menengah mendorong produktivitas dan distribusi hasil pertanian, serta jangka panjang memperkuat konektivitas, meningkatkan nilai aset desa, dan menarik investasi.

d. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Program

Efektivitas Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari serapan anggaran dan capaian fisik, tetapi juga dari kualitas pemantauan program. Monitoring mencakup kesesuaian pelaksanaan dengan rencana waktu, anggaran, dan kualitas yang disepakati antara pelaksana dan pemerintah desa. Berdasarkan wawancara dengan LPMD, seluruh kegiatan prioritas telah diawasi cukup baik, meski dokumentasi formal perlu ditingkatkan. Contohnya, pengawasan BPD dan Kepala Dusun terhadap pembangunan betonisasi jalan di Dukuh Kramat RW 04 yang sempat tertunda karena cuaca. Pengawasan masih manual, tanpa teknologi monitoring, sehingga validasi waktu dan mutu proyek menjadi terbatas.

Bapak Hari Supriyanto, SE MM selaku perwakilan dari LPMD (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa) wawancara pada Jumat, 18 April 2025 menjelaskan pentingnya pemantauan langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, terutama yang bersumber dari Dana Desa dan APBDDes. Saat ditanyakan mengenai siapa saja yang terlibat dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan, beliau menjawab:

"Itu program kaitannya dengan Dana Desa dan APBDDes, jadi mayoritas stakeholder-nya memang dari desa. Pelaksanaan sampai ke warga juga dikelola oleh desa. Sekarang sudah ada kelompok TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang langsung turun ke masyarakat. Nah, pengawasan juga dilakukan secara langsung oleh desa, karena menyangkut anggaran yang dikelola dari APBDDes."

Beliau menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemerintah desa dalam memantau proyek untuk memastikan kesesuaian teknis dan menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat. Saat ditanya, dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 telah ditentukan.

Pengelolaan dana desa di Desa Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar berjalan sesuai rencana berkat pengawasan dan pemantauan yang rutin dilakukan. Pemantauan memastikan kegiatan sesuai perencanaan, anggaran, dan standar teknis, dengan keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, serta pihak kecamatan atau kabupaten. Stakeholder berpartisipasi melalui musyawarah, inspeksi, dan kontribusi sumber daya, menjamin transparansi serta akuntabilitas. Hasil pemantauan

ditindaklanjuti dengan laporan berkala berisi temuan lapangan, progres fisik dan keuangan, serta kendala yang dihadapi. Laporan disampaikan kepada pihak terkait sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pembangunan, dilengkapi dokumentasi, rekap material, dan foto progres.

2. Pembahasan

Efektivitas Dana Desa di Desa Kemiri pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari empat indikator utama. Pertama, ketepatan sasaran program terlihat dari fokus pembangunan pada infrastruktur prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga, seperti jalan desa, rabat beton, drainase, talud, dan fasilitas publik. Infrastruktur ini secara langsung mendukung aksesibilitas dan produktivitas masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan mobilitas ekonomi. Kedua, sosialisasi program dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Proses ini memastikan bahwa arah pembangunan disepakati bersama dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Ketiga, tujuan program diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar dusun, memperlancar akses hasil pertanian, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Keempat, pemantauan pelaksanaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), BPD, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan. Pengawasan ini mencakup inspeksi

langsung di lapangan dan penyusunan laporan berkala, sehingga kualitas pekerjaan dapat terjaga sesuai standar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program dan pemantauan program terbukti saling mendukung dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan, seperti perbaikan jalan, rabat beton, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal dan kualitas hidup warga. Melalui mekanisme pengawasan berlapis dan forum evaluasi tahunan, proses pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri mampu mempertahankan kinerja yang optimal sekaligus membuka ruang perbaikan untuk periode selanjutnya. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi desa lain dalam memaksimalkan manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Indonesia. (2024). Statistik Potensi Desa Indonesia 2021. *Statistik*

Potensi Desa Indonesia, 15, 45. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html?utm>

Dunn, W. N. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handayani, S. T. (2024). Menuju Kemajuan Sosial dan Humaniora: Membangun Desa-desanya Unggul Untuk Indonesia. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 22(6), 297–303. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/viewFile/23942/9434>

<https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/> (diakses pada 25 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB). (2025).

Wawancara pada Jumat, 18 April 2025 dengan Anggota LPMD Bapak Hari Supriyanto, SE MM. (2025).

Wawancara pada Kamis, 17 April 2025 dengan Kepala Desa Kemiri Bapak Amin Sadimin. (2025).

Wawancara pada Kamis, 17 April 2025 dengan Sekretaris Desa Kemiri Ibu Sri Mulyani, SE. (2025).